BAB II

TINDAK PIDANA TERORISME

A. Pengertian Tindak Pidana , dan Unsur-unsur Tindak Pidana

Ada banyak istilah terkait dengan tindak pidana. Ada yang menggunakan istilah “delik”, yang berasal dari bahasa Latin, yaitu *delictum*. Dalam bahasa Jerman dan Belanda, digunakan istilah *delict*. Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang digunakan di Indonesia, bersumber dari *Wetboek van Strafrecht* Netherland, maka pembentuk Undang-Undang menggunakan istilah *strafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana.

Istilah *strafbaar feit*, terdiri dari tiga unsur kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh, dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Jadi istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.³⁴

Konsep hukum indonesia terdapat beberapa perbedaan dalam menyebutkan istilah tindak pidana. Ada yang menyebutkan istilah tindak pidana tersebut sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana dan delik. Sedangkan dalam bahasa Belanda istilah tindak pidana tersebut dengan *strafbaar feit* atau *delict*.

³⁴ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, hlm. 19

Menurut Roeslan Saleh, perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang terhadap pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Sedangkan menurut Tresna, peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lain terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.³⁵

Para pakar asing hukum pidana kemudian mendefinisikan *strafbaar feit* menurut pandangannya masing-masing. Simons merumuskan, *strafbaar feit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubung dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.³⁶ Sedangkan Van Hamel berpendapat bahwa, *strafbaar feit* itu adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam Undang-Undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana, dan dilakukan dengan kesalahan.³⁷

Strafbaar feit juga diartikan oleh Pompe sebagai Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana

³⁵ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2003, hlm 53

³⁶ E.Y. Kanter, S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002 hlm.205

³⁷ Ibid, hlm. 210

penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum³⁸

Menurut Simon *strafbaar feit* adalah kelakuan atau hendeling yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.³⁹

Sementara Jonkers merumuskan bahwa:

“*Strafbaar feit* sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai “suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.”⁴⁰

Istilah *strafbaar feit* setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kemudian diartikan secara berlainan oleh beberapa ahli hukum pidana, sehingga melahirkan istilah yang berbeda-beda pula. Ada yang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang dapat dihukum, tindak pidana, dan delik.

Utrecht lebih menganjurkan pemakaian istilah peristiwa pidana, karena istilah pidana menurut beliau yaitu perbuatan (*andelen*) atau doen positif atau melainkan (*visum atau nabetan*) atau *met doen, negative*

³⁸ Lamintang, P.A.F, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997 hlm. 34

³⁹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983, hlm 56

⁴⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2002 hlm.

maupun akibatnya.⁴¹ Moeljatno menggunakan istilah “perbuatan pidana”, karena menurutnya, kata “perbuatan” lebih lazim digunakan setiap hari, contohnya perbuatan cabul, perbuatan jahat atau perbuatan melawan hukum.⁴² Lebih lanjut, Moeljatno menjelaskan bahwa yang dilarang itu adalah perbuatan manusia yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya. Sedangkan ancaman pidananya itu ditujukan pada orangnya. Larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditujukan pada orangnya) ada hubungan yang erat, dan oleh karena itu perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula.

Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjukkan pada dua keadaan konkrit yaitu pertama, adanya kejadian tertentu (perbuatan) dan kedua adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu.⁴³ Jadi, menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar aturan tersebut.⁴⁴

⁴¹ Amir Ilyas, *op.cit.*, hlm.22

⁴² S.R. Sianturi, *op.cit.*, hlm.207

⁴³ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 58-60

⁴⁴ *Ibid*, hlm.55

H.J Van Schravendiik menggunakan istilah perbuatan yang boleh dihukum. S.R. Sianturi menggunakan istilah tindak pidana dalam memberikan perumusannya sebagai berikut: Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab).⁴⁵ Sedangkan Andi Hamzah dalam bukunya, menggunakan istilah delik, yang berarti suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang .⁴⁶

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harus memenuhi beberapa unsur. Untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*strafbaarfeit*). Menurut Sudarto, pengertian unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur- unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang.

Unsur-unsur tindak pidana yang diberikan beberapa tokoh memiliki perbedaan, tetapi secara prinsip intinya sama. Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya

⁴⁵ S. R. Sianturi., *op.cit.*, hlm.211

⁴⁶ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 72

dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif.

Yang dimaksud dengan unsur-unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur obyektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.⁴⁷

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa/dolus*);
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poggin* seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Macam- macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan – kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

⁴⁷ Lamintang, *op-cit*, hlm 183

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrecht elicjkheid*;
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
3. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat .

Berkaitan dengan pengertian unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*) ada beberapa pendapat para sarjana mengenai pengertian unsur-unsur tindak pidana menurut aliran monistis dan menurut aliran dualistis. Para sarjana yang berpandangan aliran monistis, yaitu :

1. **D. Simons**, sebagai menganut pandangan monistis Simons mengatakan bahwa pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah "*Een strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon*". Atas dasar pandangan tentang tindak pidana tersebut di atas, unsur-unsur tindak pidana menurut Simons adalah :
 - a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
 - b. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
 - c. Melawan hukum (*onrechtmatig*);
 - d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staad*);

- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab
(*toerekeningsyatbaar persoon*).⁴⁸

Dari unsur-unsur tindak pidana tersebut Simons membedakan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari *strafbaarfeit* adalah:

- a. Yang dimaksud dengan unsur subyektif ialah perbuatan orang;
- b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
- c. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan-perbuatan;
- d. itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat "*openbaar*" atau "dimuka umum" .

Selanjutnya unsur subyektif dari *strafbaarfeit* adalah

- a. Orang yang mampu bertanggung jawab ;
- b. Adanya kesalahan (*dolus atau culpa*). Perbuatan harus dilakukan dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.⁴⁹

2. **Van Hamel**, menyatakan *Stafbaarfeit* adalah *een weterlijk omschre en mensschelijke gedraging onrechmatig, strafwardig en aan schuld te wijten*. Jadi menurut Van Hamel unsur-unsur tindak pidana adalah :

⁴⁸ Sudarto, *Hukum Pidana 1 A - 1B*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 1990/1991, hlm. 32

⁴⁹ *Ibid*, hlm 32

- a. Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang;
 - b. Bersifat melawan hukum ;
 - c. Dilakukan dengan kesalahan ;
 - d. Patut dipidana.⁵⁰
2. **E. Mezger**, menyatakan tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana, dengan demikian unsur-unsurnya yaitu :
- a. Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan);
 - b. Sifat melawan hukum (baik bersifat obyektif maupun bersifat subyektif);
 - c. Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang;
 - d. Diancam dengan pidana.
3. **Baumman**, menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik :
- a. Bersifat melawan hukum; dan
 - b. Dilakukan dengan kesalahan.⁵¹

Dari pendapat para sarjana yang beraliran monistis tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak adanya pemisahan antara *criminal act* dan *criminal responsibility*. Lebih lanjut mengenai unsur-unsur tindak pidana menurut pendapat para sarjana yang berpandangan dualistis adalah sebagai berikut :

1. **H.B. Vos**, menyebutkan *Strafbaarfeit* unsur-unsur sebagai berikut :

⁵⁰ *Ibid*, hlm 33

⁵¹ *Ibid*, hlm 45

- a. Kelakuan manusia dan
 - b. Diancam pidana dengan undang-undang.
2. **W.P.J. Pompe**, menyatakan menurut hukum positif *strafbaarfeit* adalah tidak lain dari *feit*, yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang, jadi perbuatan itu adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana.
3. **Moeljatno**, memberikan arti tentang *strafbaarfeit*, yaitu sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur :
- a. Perbuatan (manusia);
 - b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat formil);
 - c. Syarat formil itu harus ada karena keberadaan asas legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Syarat materiil pun harus ada pula, karena perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, oleh karena itu bertentangan dengan atau menghambat tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat .

Dengan demikian pandangan sarjana yang beraliran dualistis ini ada pemisahan antara *criminal act dan criminal responsibility*. Menurut Sudarto, baik aliran monistis maupun dualistis, tidak mempunyai

perbedaan yang prinsipil dalam menentukan adanya pidana. Apabila orang menganut pendirian yang satu, hendaknya memegang pendirian itu secara konsekuen, agar tidak terjadi kekacauan pengertian.

Bagi orang yang berpandangan monistis, seseorang yang melakukan tindak pidana sudah dapat dipidana, sedangkan bagi yang berpandangan dualistis, sama sekali belum mencukupi syarat untuk dipidana karena masih harus disertai syarat pertanggungj awaban pidana yang harus ada pada si pembuat atau pelaku pidana. Jadi menurut pandangan dualistis semua syarat yang diperlukan untuk pengenaan pidana harus lengkap adanya.⁵²

B. Berlakunya Ketentuan Hukum Pidana Berdasarkan Tempat dan Waktu

Berlakunya ketentuan hukum pidana menurut tempat dan waktu, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 KUHPidana penting diketahui, sehubungan hal-hal dibawah ini :

1. Kapankah ketentuan hukum pidana itu diberlakukan
2. Terhadap siapakah ketentuan hukum pidana itu diberlakukan ;
3. Apa muatann dari hukum pidana itu ;
4. Dimanakah hukum pidana itu diberlakukan.

⁵² *Ibid*, hlm 27

Mengenai berlakunya ketentuan hukum pidana menurut waktu (tempo) dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (1 dan 2) KUHPidana. Pasal 1 ayat (1) KUHPidana yang berbunyi :

“tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali didasarkan pada ketentuan undang-undang pidana yang diadakan terlebih dahulu”

Pasal 1 ayat (1) KUHPidana ini merupakan tonggak tiang, pilar hukum pidana. Merupakan azas legalitas atau *principle of legality*. Dengan azas legalitas ini dimaksudkan bilamana terjadi suatu tindak pidana dan ada sangkaan telah dilakukan oleh seseorang, maka terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana itu harus dilakukan penuntutan oleh Negara *in casu* oleh pihak kejaksaan.⁵³

Tempus delicti penting karena berhubungan dengan :

1. Pasal 1 KUHP, untuk menentukan apakah perbuatan yang bersangkutan paut pada waktu itu sudah dilarang dan diancam dengan pidana atau belum;
2. Pasal 44 KUHP, untuk menentukan apakah terdakwa ketika itu mampu bertanggung jawab atau tidak;
3. Pasal 45 KUHP, untuk menentukan apakah terdakwa ketika melakukan perbuatan sudah berumur 16 tahun atau belum, jika belum berumur 16 tahun, maka boleh memilih antara ketiga kemungkinan;

⁵³ Buchari Said, *Hukum Pidana Materil*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, 2009, hlm.54

4. Pasal 79 KUHP (*verjaring atau daluarsa*), dihitung mulai dari hari setelah perbuatan pidana terjadi .

Azas yang termuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHPidana ini dikenal dengan nama: *nullum delictum, nulla poen sine praevia lege poenali*. Merupakan suatu azas tentang berlakunya ketentuan hukum pidana dalam perundang-undangan menurut waktu. Azas legalitas ini secara rinci didalam bahasa Latinnya adalah :

1. *nulla poena sine lege* – tiada pidana tanpa ketentuan undang-undang;
2. *nulla poena sine crimine* – tiada pidana tanpa kejahatan
3. *nulun crimen sine poena legali* – tiada tindak pidana tanpa dirumuskan dalam suatu undang-undang⁵⁴

Rumusan tersebut dapat dirangkum dalam kalimat : “*nullum crimen, nulla poena sine praevia lege*” (tiada tindak pidana, kecuali adanya ketentuan undang-undang yang dibuat terlebih dahulu dari perbuatan tersebut). Maksud dicantumkannya Pasal 1 ayat (1) KUHPidana adalah :

1. Untuk melindungi individu dari tindakan hakim yang sewenang-wenang, yakni melindungi kemerdekaan individu terhadap tuntutan yang sewenang-wenang dari penguasa (faham aliran klasik);
2. Untuk membatasi hasrat manusia yang cenderung berbuat jahat atau melakukan suatu kejahatan.

⁵⁴ *Ibid*, hlm.55

Locus delicti adalah tempat terjadinya tindak pidana, sedangkan yang dimaksud dengan tempus delicti adalah waktu terjadinya suatu tindak pidana. Untuk menentukan locus delicti dan tempus delicti tidaklah mudah. Namun walaupun demikian, penyebutan secara tegas mengenai kedua hal ini sangat berperan penting bagi berbagai permasalahan yang terdapat dalam bidang hukum pidana.

Meskipun locus delicti dan tempus delicti ini tidak ada ketentuannya di dalam KUHP, locus dan tempus delicti tetap perlu diketahui. Locus delicti perlu diketahui untuk :

1. Menentukan apakah hukum pidana Indonesia tetap berlaku terhadap perbuatan pidana tersebut atau tidak, ini berhubungan dengan Pasal 2-8 KUHP ;
2. Menentukan kejaksaan dan pengadilan mana yang harus mengurus perkaranya, ini berhubungan dengan kompetensi relative.

Menurut Van Hamel yang dianggap sebagai *locus delicti* adalah :

1. Tempat di mana seorang pelaku itu telah melakukan sendiri perbuatannya;
2. Tempat di mana alat yang telah dipergunakan oleh seorang pelaku itu bekerja;
3. Tempat di mana akibat langsung dari sesuatu tindakan itu telah timbul;
4. Tempat di mana sesuatu akibat konstitutif itu telah diambil.

Berlakunya ketentuan hukum pidana menurut tempat (*territorial sphere*). Yang mengedepan mengenai berlakunya ketentuan hukum pidana menurut tempat adalah bahwa ketentuan hukum pidana kita tidak hanya berlaku didalam wilayah Negara Republik Indonesia akan tetapi berlaku juga diluar batas wilayah Negara Republik Indonesia. Ada 4 sistem, azas, dasar yang dipergunakan didalam undang-undang hukum pidana, yakni :⁵⁵

1. Azas Territorial.

Azas ini terdapat didalam Pasal 2 KUHPidana yang berbunyi : “aturan didalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana didalam wilayah Indonesia”. Ini artinya siapapun apakah warga Negara Indonesia atau bukan warga Negara Indonesia (warga asing) yang melakukan tindak pidana dalam wilayah Negara ini berlakulah undang-undang pidana Indonesia. Siapapun akan dituntut berdasarkan undang-undang pidana Indonesia, bilamana orang tersebut melakukan tindak pidana didalam wilayah Negara Indonesia. Ini merupakan suatu konsekuensi dari sebuah Negara yang merdeka dan berdaulat.

Parameter yang dipergunakan adalah tindak pidana itu dilakukan didalam wilayah Negara Indonesia. Dengan demikian bukan ukurannya bahwa pelaku berada didalam batas wilayah Negara. Dengan demikian dapat dilakukan suatu tindak pidana didalam wilayah Negara Indonesia sedangkan pelakunya berada diluar wilayah Republik Indonesia. Jadi,

⁵⁵ *Ibid*, hlm.62

bahwa ukuran dari Pasal 2 KUHPidana ini adalah tempat tindak pidana itu dilakukan, bukan pelakunya.

Pasal 3 KUHPidana mengatakan: “aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang berada diluar Indonesia, melakukan tindak pidana didalam perahu Indonesia”

Ini berarti siapapun yang melakukan tindak pidana didalam perahu atau kapal Indonesia, kendatipun perahu atau kapal Indonesia itu berada diluar wilayah Indonesia, maka terhadap kejahatan tersebut berlakulah hukum pidana Indonesia. Bahwa ciri yang menentukan perahu atau kapal itu milik Indonesia terlihat dari bendera yang terpasang ditiang bendera bagian buritan perahu atau kapal. Tujuan dari Pasal 3 KUHPidana ini adalah agar tindak pidana itu ada yang mengadilinya.⁵⁶

Pelajaran mengenai tempat terjadinya tindak pidana (*locus delicti*) tidak diatur didalam KUHPidana. Mengenai dimana tempat terjadinya tindak pidana, maka hal ini diserahkan kepada ilmu pengetahuan atau yurisprudensi.

Agar dapat menyelesaikan permasalahan tentang *locus delicti*⁵⁷ ini maka ilmu pengetahuan bersama-sama yurisprudensi hukum pidana telah melahirkan 3 teori :

- a. Teori perbuatan materiil

⁵⁶ *Ibid*, hlm 64

⁵⁷ *Ibid*, hlm.66

Yang menjadi locus delicti adalah tempat dimana pelaku melakukan segala sesuatu yang kemudian dapat mengakibatkan tindak pidana yang bersangkutan

b. Teori alat yang dipergunakan

Menurut teori alat yang dipergunakan, tindak pidana dilakukan ditempat dimana alat yang dipergunakan itu menyelesaikan.

c. Teori Akibat

Apabila teori instrumen tidak dapat memberikan penyelesaian yang dikehendaki, karena tidak ada instrument yang dipergunakan, maka menurut teori ini tempat akibat merupakan *locus delicti*.

2. Azas Nasional Aktif

Azas nasional aktif adalah kewarganegaraan pelaku tindak pidana, sedangkan untuk nasional pasif adalah kewarganegaraan dari kepentingan yang hendak dilindungi. Azas nasional aktif terdapat didalam Pasal 5 KUHPidana. Warga Negara Indonesia yang melakukan kejahatan-kejahatan yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) kendati diluar wilayah Indonesia, dapat dijerat dengan undang-undang pidana Indonesia, apabila mereka itu melakukan tindak pidana lainnya yang oleh undang0undang pidana Indonesia dipandang sebagai kejahatan, hanya dapat dikenakan undang-undang pidana Indonesia jika perbuatan yang dilakukan itu oleh undang-undang pidana di Negara asing dimana perbuatan itu dilakukan, diancam pula dengan Pidana.

Hal ini hanya berlaku bagi warga negara Indonesia tidak bagi warga Negara asing, kecuali jika setelah kejahatan itu dilakukan, pelakunya masuk warga negara Indonesia. KUHPidana berlaku juga terhadap warga Negara Indonesia melakukan tindak pidana tertentu, dibagi dalam 2 golongan :

- I. a. Kejahatan terhadap keamanan Negara. Buku II, Bab I
KUHPidana, yaitu : Pasal-pasal 104 s/d 129;
- a. Kejahatan terhadap martabat kepala Negara dan wakil kepala Negara. Buku II, Bab II, yaitu : Pasal-pasal 131 s/d 139 ayat (2,3);
- b. Menghasut (Pasal 160 KUHPidana);
- c. Menyiarkan tulisan yang bertujuan menghasut. (Pasal 161 KUHPidana);
- d. Dengan sengaja membuat diri atau membuat orang lain tidak cakap untuk memenuhi kewajiban militer (Pasal: 240 KUHPidana);
- e. Melakukan perompakan (pembajakan di laut) (Pasal-pasal 450 dan 451 KUHPidana).

Kejahatan-kejahatan tersebut secara tegas dicantumkan dalam KUHPidana Pasal 5 ayat (1) oleh karena perbuatan-perbuatan tersebut mengancam kepentingan yang khusus bagi Indonesia dan perbuatan-perbuatan tersebut tidak dikenai pidana menurut undang-undang pidana Negara asing dimana perbuatan itu dilakukan. Hazewinkel Zuringa

mengatakan bahwa biasanya tindak pidana-tindak pidana tersebut tidak dikenai pidana menurut hukum pidana asing. Tiap Negara nasional terutama hanya memperhatikan kepentingan-kepentingan nasionalnya sendiri⁵⁸

- II. Semua kejahatan yang menurut KUHPidana dipidana, juga dipidana oleh hukum pidana asing, dimana kejahatan itu dilakukan. Dengan demikian harus dipenuhi 2 syarat :
 - a. Kejahatan menurut KUHPidana;
 - b. Juga dipidana oleh hukum pidana asing, dimana kejahatan itu dilakukan.

Dengan demikian ada beberapa tindak pidana yang menimbulkan bahaya bagi keamanan dan ketertiban nasional, sehingga perlu dilakukan tindakan untuk menuntut, mempidana warga Negara Indonesia melakukan tindak pidana-tindak pidana tersebut dimana pun warga Negara Indonesia itu berada. Demikian pula halnya bilamana warga Negara Indonesia itu pergi ke luar negeri, tetap saja yang bersangkutan dituntut, dan dipidana karena perbuatan-perbuatannya yang membahayakan keamanan dan ketertiban nasional.⁵⁹

3. Azas Nasional Pasif.

Azas ini memberikan proteksi terhadap kepentingan nasional Indonesia (masyarakat Indonesia) dari serangan siapapun juga (baik warga

⁵⁸ E. Utrecht, *Op-cit*, hlm 246

⁵⁹ Buchari Said, *Loc.cit*

Negara Indonesia maupun warga Negara asing) dimana saja baik didalam maupun diluar wilayah Negara Indonesia serangan itu dilancarkan. Titik tolak dari azas nasional pasif ini adalah menekankan kepentingan nasional yang terancam.

Hazewinkel Zuringa menyebutkan bahwa tidaklah dihiraukan kewarganegaraan pelaku atau tempat dimana perbuatan itu dilakukan. Pompe menyebutkan azas nasional pasif sebagai azas perlindungan murni (*zuivere beschermings principe*). Azas ini tercantum dalam :

- a. Pasal 4 KUHPidana berbunyi : “aturan pidana dalam undang-undang republik Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan diluar daerah republik Indonesia:

Ke-1 Salah satu kejahatan yang tertera dalam Pasal-pasal: 104, 106, 107, 108, 110, 111 bis pada ke-1, 127 dan 131

Ke-2 Bagian kalimat “atau tentang materai atau merek yang dikeluarkan atau digunakan oleh Pemerintah Republik Indonesia”

Ke-3 “Pemalsuan tentang surat-surat hutang atau sertifikat-sertifikat utang yang ditanggung Pemerintah Republik Indonesia, daerah atau sebagian daerah, pemalsuan talon-talon, surat-surat utang sero (keterangan deviden) atau surat-surat bunga uang yang masuk surat-surat itu, serta surat-surat keterangan ganti surat itu atau dengan sengaja

mempergunakan surat palsu atau yang dipalsukan seperti itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan”

b. Pasal 8 KUHPidana berbunyi :

“aturan pidana dalam undang-undang republik Indonesia berlaku bagi nakhoda dan orang yang berlayar dengan alat pelayaran Indonesia, juga pada waktu mereka tidak diatas alat pelayaran itu, melakukan salah satu perbuatan yang dapat dipidana, yang tersebut dalam Bab XXIX Buku II dan Bab IX Buku III, demikian juga yang tersebut dalam undang-undang umum tentang surat-surat laut dan pas-pas kapal di Indonesia dan yang tersebut dalam undang-undang kapal 1935”

Menurut Hazewinkel Zuringa bahwa azas nasionalitas pasif ini bermaksud untuk melindungi kepentingan umum yang besar dan tidak bermaksud untuk melindungi kepentingan individual. Vos juga mengatakan bahwa azas nasional pasif ini melindungi kepentingan kolektif dan bukan kepentingan individual.⁶⁰

4. Azas Universalitas.

Dalam azas universalitas tidak memperhatikan kewarga negaraan atau nasionalitas dari kepentingan yang hendak dilindungi. Kepentingan Negara asing dilindungi oleh azas universalitas ini. Jadi azas ini memperhatikan kepentingan dunia.

Azas ini tertuang dalam Pasal 4 ke-1 dalam kalimat: “suatu kejahatan tentang mata uang, uang kertas Negara atau uang kertas bank”

Asas ini melihat hukum pidana berlaku umum, melampaui batas ruang wilayah dan ruang orang (Indonesia). Yang dilindungi disini ialah

⁶⁰ *Ibid*, hlm.71

kepentingan dunia. Jenis kejahatan yang diancam pidana menurut asas ini sangat berbahaya bukan saja dilihat dari kepentingan Indonesia tetapi juga kepentingan dunia. Secara universal (menyeluruh diseantero dunia) jenis kejahatan ini dipandang perlu dicegah dan diberantas. Demikianlah, sehingga orang Jerman menamakan asas ini *weltrechtsprinzip* (asas hukum dunia). Disini kekuasaan kehakiman menjadi mutlak karena yuridiksi pengadilan tidak tergantung lagi pada tempat terjadinya delik atau nasionalitas atau domisili terdakwa.⁶¹

C. Pengertian Tindak Pidana Penculikan

Culik atau menculik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mencuri atau melarikan orang lain dengan maksud tertentu sedangkan penculikan adalah proses atau cara atau perbuatan menculik, dan orang yang menculik disebut penculik.⁶²

Menurut Moeljatno Kejahatan dalam bahasa Belanda disebut *misdriften* yang berarti “suatu perbuatan yang tercela dan berhubungan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melanggar hukum.”⁶³ “Mengenai definisi” kejahatan adalah merupakan bagian dari perbuatan

⁶¹ Andi Hamzah, *Asas Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, 1994, cet. ke-2, hlm. 45.

⁶² Kbbi.web.id

⁶³ *op-cit*

melawan hukum atau delik, bagian lainnya adalah pelanggaran.

Pengertian kejahatan menurut G.W. Bawengan , yaitu : ⁶⁴

1. Pengertian secara praktis yaitu setiap pelanggaran norma sosial yang ada di dalam masyarakat, dengan kata lain bahwa suatu perbuatan dikatakan kebaikan bila dia berada dalam sisi garis yang telah ditetapkan oleh norma, di lain pihak suatu perbuatan dikatakan kejahatan bila perbuatan itu telah lewat garis yang telah ditetapkan oleh norma.
2. Pengertian kejahatan secara yuridis dapat dilihat dalam KUHP". Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membedakan antara perbuatan yang digolongkan sebagai suatu "pelanggaran" dan perbuatan yang digolongkan sebagai suatu "kejahatan". KUHP sendiri terdiri dari tiga buku yaitu : Buku pertama berisi tentang peraturan umum, buku kedua berisikan tentang kejahatan, buku ketiga berisikan tentang pelanggaran.

Pengertian kejahatan ini dapatlah diketahui bahwa terdapat berbagai bentuk kejahatan salah satu bentuk kejahatan tersebut adalah kejahatan penculikan. Kejahatan penculikan dalam Buku kedua KUHP termasuk dalam bab yang mengatur tentang kejahatan terhadap kemerdekaan orang. Kejahatan penculikan dikatakan sebagai kejahatan

⁶⁴ Bawengan, G.W, *Hukum Pidana dalam Teori dan Praktek*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1991,Hlm. 6

terhadap kemerdekaan seseorang karena dengan sengaja menarik, membawa pergi atau menyembunyikan seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan secara melawan hukum yang dapat merugikan beberapa pihak seperti korban maupun orang tua korban bahkan masyarakat luas yang merasa tidak aman dan nyaman dengan tindakan si pelaku.

Penculikan merupakan tindakan yang sudah dianggap sebagai bentuk ketidakadilan, perampasan hak kebebasan atau kemerdekaan hidup seseorang. Perampasan kemerdekaan dengan cara demikian telah ditetapkan sanksi hukumnya dalam pasal 328 KUHP tentang penculikan. Mengenai pasal yang berkenaan dengan masalah kejahatan dalam kasus ini diatur dalam KUHPidana, buku II Penculikan yaitu membawa pergi seseorang dari kediamannya dengan maksud atau secara melawan hukum, hal ini tercantum dalam pasal 328 KUHPidana yang berbunyi :

“Barang siapa membawa pergi seseorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dalam maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum dibawah kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara diancam karena penculikan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Unsur-unsur tindak pidana penculikan yaitu :

1. Membawa pergi seseorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara. Misalnya dibawa pergi dari rumahnya atau tempat kostnya atau dari rumah tempatnya menumpang (misalnya rumah keluarganya)

2. Membawa pergi itu dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain atau untuk membuat dia dalam keadaan sengsara. Artinya selain dibawa pergi diluar kehendak korban, hal itu juga dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum, misalnya diancam, dipaksa, dibohongi.

D. Pengertian Tindak Pidana Terorisme dan Klasifikasi Terorisme

Dalam kamus Hubungan Internasional dinyatakan bahwa terorisme adalah kegiatan negara atau pelaku non negara yang mempergunakan teknik kekerasan dalam usahanya menggapai tujuan politik⁶⁵. Sejalan dengan pengertian tersebut A. Hasnan Habib⁶⁶ mendefinisikan terorisme. Terorisme adalah penggunaan ancaman kekerasan fisik yang direncanakan, dipersiapkan dan dilancarkan secara mendadak terhadap sasaran langsung yang lazimnya adalah non kombatan untuk mencapai suatu tujuan. Terorisme melibatkan kelompok-kelompok yang berusaha untuk menumbangkan rezim-rezim tertentu, untuk mengoreksi keluhan kelompok atau nasional atau menggerogoti tata politik internasional yang ada

A. Hasnan Habib dan para pengamat lainnya menyatakan bahwa sulit untuk mengenali gerakan terorisme, karena serangan yang spontan dan gerakannya relatif tertutup (*under ground*) serta jaringan

⁶⁵ Jack.C. Plano dan Roy Olton. Kamus hubungan internasional, Abardin, Bandung, 1999, Hlm 550

⁶⁶ A. Hasnan. Habib. *Strategis dan hubungan internasional*,Kapita selekta, Bandung, 1990, Hlm.102

kerjasamanya yang luas, menjadikan terorisme sulit dilokalisir dan diantisipasi. Begitupun ancaman terorisme di kawasan Asia Pasifik yang sulit diprediksi namun indikasi kemunculannya terlihat dari konflik-konflik teritorial yang ada di kawasan tersebut.

Teroris itu sendiri merupakan suatu tindakan yang bertujuan memberikan rasa takut yang berlebihan melalui ancaman maupun bentuk kekerasan lainnya sehingga tidak hanya korban luka-luka saja yang ditimbulkan karenanya melainkan korban jiwa sehingga bukti tekanan yang dilakukan kelompok yang menggunakan cara-cara teroris.

Sependapat dengan hal tersebut Walter S. Jones⁶⁷ menerangkan bahwa Terorisme dalam perspektif hubungan internasional, bahwa aksi terorisme, dengan atau tanpa perlombaan senjata akan selalu berhadapan dengan masalah kekuasaan, persaingan dan konflik, selama negara-negara tetap menjadi aktor dominan, kesenjangan kekayaan, kecurigaan ideologis, konflik kepentingan, bentrokan tujuan, persepsi dan salah persepsi serta aspek hubungan internasional lainnya akan terus memastikan bahwa negara-negara akan menggunakan kekuasaannya untuk mengejar kepentingan dan kebutuhannya dan sayangnya, segenap aspek tersebut juga akan terus memastikan bahwa manusia akan mencurahkan keahlian ilmiah dan prestasi teknologinya untuk memperbaiki kondisi hidup manusia sekaligus menghancurkannya.

⁶⁷ Walter S. Jones. *Logika hubungan Internasional Jilid 2*, Rajawali press, Jakarta, 1993, Hlm.176

Teror dan terorisme adalah dua kata hampir sejenis yang belakangan ini menjadi topik populer. Istilah terorisme itu sendiri berkaitan dengan kata teror dan teroris, yang secara umum belum memiliki pengertian atau definisi yang baku dan universal. Menurut hukum nasional masing-masing negara, di samping bukan berarti meniadakan sifat jahat perbuatan itu dan dengan demikian lantas bisa diartikan bahwa pelaku terorisme bebas dari tuntutan hukum.

Nullum crimen sine poena, bunyi sebuah asas hukum tua, yang bermakna bahwa tiada kejahatan yang boleh dibiarkan berlaku begitu saja tanpa hukuman, tetapi faktanya terorisme menjadi *Internationally Organized Crime* maka sangatlah sulit untuk memberantas kejahatan jenis ini tanpa adanya kerjasama dan pemahaman yang sama di kalangan negara-negara.

Untuk memahami makna terorisme lebih jauh dan mendalam, dapat dikaji terlebih dahulu definisi terorisme yang dikemukakan oleh beberapa lembaga atau ahli, diantaranya:

1. *US Central Intelligence Agency (CIA)*; terorisme internasional adalah terorisme yang dilakukan dengan dukungan pemerintah atau organisasi asing dan atau diarahkan untuk melawan negara, lembaga atau pemerintah asing.
2. *US Federal Bureau of Investigation (FBI)*; terorisme adalah penggunaan kekerasan tidak sah atau kekerasan atas seseorang atau

harta untuk mengintimidasi sebuah pemerintah, penduduk sipil serta elemennya untuk mencapai tujuan sosial atau politik.

3. *US Departments of State and Defense*; terorisme adalah kekerasan bermotif politik dan dilakukan oleh agen negara atau kelompok subnasional terhadap sasaran kelompok non kombatan. Biasanya dengan maksud untuk mempengaruhi audiens. Terorisme internasional adalah terorisme yang melibatkan warga negara atau wilayah lebih dari satu negara.
4. *Black's Law Dictionary*; terorisme adalah kegiatan yang melibatkan unsur kekerasan atau yang menimbulkan efek bahaya bagi kehidupan manusia yang melanggar hukum pidana Amerika, atau negara bagian Amerika, dan dimaksudkan untuk mengintimidasi penduduk sipil, mempengaruhi kebijakan pemerintah, mempengaruhi penyelenggaraan negara dengan cara penculikan dan pembunuhan.
5. *The Arab Convention on the Supression of Terorism(1998)*; terorisme adalah tindakan atau ancaman kekerasan, apapun motif dan tujuannya, yang terjadi untuk menjalankan agenda tindak kejahatan individu atau kolektif yang menyebabkan teror di tengah masyarakat, rasa takut dengan melukai mereka atau mengancam kehidupan, kebebasan atau keselamatan atau bertujuan untuk menyebabkan kerusakan lingkungan atau harta publik maupun

pribadi atau menguasai dan merampasnya atau bertujuan untuk mengancam sumber daya nasional.

6. *Treaty on Cooperation among the State Members of the Commonwealth of Independent States in Combating Terrorism (1999)*; terorisme adalah tindakan illegal yang diancam hukuman di bawah hukuman pidana yang dilakukan dengan tujuan merusak keselamatan publik, mempengaruhi pengambilan kebijakan oleh penguasa atau moneter penduduk, dan mengambil bentuk kekerasan atau ancaman.⁶⁸
7. Hadi al-Madkhaly; terorisme adalah sebuah kalimat yang terbangun di atasnya makna yang mempunyai bentuk (modus) beraneka ragam yang intinya adalah gerakan intimidasi atau terror atau gerakan yang menebarkan rasa ketakutan pada individu atau kelompok masyarakat.⁶⁹
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 jo. Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pasal 6 berbunyi “ Seseorang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat masal, dengan cara merampas

⁶⁸ Muladi, *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: HabibieCenter, 2002, hlm.174.

⁶⁹ Hadi al-Madkhaly, *Terorisme Dalam Tinjauan Islam*, Tegal: Maktabah Salafy Press, 2002, hlm.1

kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun“

Dari beberapa pengertian mengenai terorisme di atas, terdapat perluasan arti dimana tindakan terorisme tersebut dulunya merupakan salah satu metode pemerintahan untuk menguasai keadaan politik di wilayahnya menjadi *crime against state and humanity*. Terkadang tindakan terorisme belakangan ini juga menyerang hati nurani perseorangan (*crime against conscience*) dikarenakan pemilihan penyerangan secara acak dan tidak menentu yang menyebabkan keresahan masyarakat. Terorisme saat ini dapat dikategorikan sebagai perang asimetris (*asymmetric warfare*). Berbeda dengan perang secara tradisional dimana kekuatan militer dan sumber daya menjadi sorotan utama, perang asimetris lebih mengutamakan tekanan psikologis.⁷⁰

Namun demikian negara-negara internasional bersepakat bahwa istilah tersebut memiliki konotasi negatif yang sekelas atau setara akibatnya dengan istilah genosida. Teror merupakan fenomena yang cukup

⁷⁰ Petrus Reinhard Golose, 2014, *Deradikalisasi Terorisme*, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta, (selanjutnya disingkat Petrus Reinhard Golose II) hlm.4

memiliki umur yang panjang dalam sejarah, hal ini dibuktikan dari akar kata teror itu sendiri yaitu adanya frase “*cimbricus terror*”.

Frase berbahasa Romawi tersebut berarti “untuk menakut-nakuti” yang menggambarkan kepanikan yang terjadi saat prajurit lawan beraksi dengan sengit dan keras.⁷¹ Kemudian kata ini berkembang meluas pertama kalinya pada zaman Revolusi Prancis menjadi *le terreur* atau *terrere* yang dipergunakan ketika adanya kekerasan bersifat brutal dengan cara memenggal banyak orang yang dituduh melakukan kegiatan anti pemerintah sehingga terorisme tersebut dapat diartikan sebagai gemar melakukan intimidasi serta aksi brutal terhadap masyarakat sipil dengan alasan-alasan tertentu.

Terorisme memiliki klasifikasi karakteristik yang hampir sama dengan kejahatan-kejahatan lainnya, hanya saja tujuan dan motivasi akan dilakukannya tindakan tersebut berbeda. Menurut *USA Army Training and Doctrine Command*, terdapat beberapa kategori mengenai motivasi yang umum digunakan sebagai alasan terorisme oleh suatu gerakan tertentu, antara lain :⁷²

1. Separatisme. Motivasi gerakan untuk mendapatkan eksistensi kelompok melalui pengakuan kemerdekaan, otonomi politik,

⁷¹ URL : <http://crimemuseum.org/library/terorrism/originsOfTheTermTerrorism.html>, diakses tanggal 4 November 2019, pukul 01.13 WIB

⁷² US Army TRADOC, 2007, *Military Guide to Terrorism*, US TRADOC, Kansas, hlm 51

II-5, URL : fas.org/irp/threat/terrorism/guide.pdf, diakses tanggal 3 November 2019, pukul 19:00 WIB

kedaulatan, atau kebebasan beragama. Kategori ini dapat timbul dari nasionalisme dan etnosentrisme pelaku.

2. Etnosentrisme. Motivasi gerakan berlandaskan kepercayaan, keyakinan, serta karakteristik sosial khusus yang mempererat kelompok tersebut sehingga terdapat penggolongan derajat suatu ras. Penggolongan ini membuat orang atau kelompok yang memiliki ras atas semena-mena dengan kelompok ras yang lebih rendah. Tujuannya ialah mempertunjukkan kekuasaan dan kekuatan (*show of power*) demi pengakuan bahwa pelaku masuk dalam ras yang unggul (*supreme race*).
3. Nasionalisme. Motivasi ini merupakan kesetiaan dan loyalitas terhadap suatu negara atau paham nasional tertentu. Paham tersebut tidak dapat dipisahkan dengan kesatuan budaya kelompok, sehingga bermaksud untuk membentuk suatu pemerintahan baru atau lepas dari suatu kedaulatan untuk bergabung dengan pemerintahan yang memiliki pandangan atau paham nasional yang sama.
4. Revolusioner. Motivasi ini merupakan dedikasi untuk melakukan perubahan atau menggulingkan pemerintahan dengan politik dan struktur sosial yang baru. Gerakan ini identik dengan idealisme dan politik komunisme.

Terorisme termasuk kedalam jenis kekerasan politis (*Political Violence*), seperti kerusuhan, huru-hara, pemberontakan, revolusi, perang saudara, gerilya, pembantaian dan lain-lain. Namun terorisme tak selalu politis, misalnya penyanderaan oleh seorang psikopat, sadisme ataupun orang iseng. Aksi terror menurut Budi Hardiman terorisme politis memiliki klasifikasi sebagai berikut⁷³ :

- a. Merupakan intimidasi yang memaksa;
- b. Memakai pembunuhan dan penghancuran secara sistematis sebagai sarana untuk suatu tujuan tertentu;
- c. Korban bukan tujuan, melainkan sarana untuk menciptakan perang urat syaraf, yakni “bunuh satu orang untuk menakuti seribu orang”;

⁷³ Budi Hardiman, dkk. *Terorisme Definisi, Aksi dan Regulasi*, Imparsial, Jakarta, 2003, Hlm 10

- d. Target aksi teror dipilih, bekerja secara rahasia, namun tujuannya adalah publisitas;
- e. Pesan aksi itu cukup jelas, meski pelaku tidak selalu menyatakan diri secara personal;
- f. Para pelaku kebanyakan dimotivasi oleh idealisme yang cukup keras, misalnya “berjuang demi agama dan kemanusiaan”. *Hard Core* kelompok teroris adalah seorang pribadi narsistis, dingin secara emosional, asketis, kaku, fanatis, dan seterusnya. Tipe personalitas “prateroris” ini cocok dengan gerakan totaliter/sistem tertutup/sekte dan seterusnya.

Selanjutnya Hoffman mengidentifikasi enam motivasi terorisme yang berkembang sampai dengan sekarang, yaitu :⁷⁴

1. Nasionalis-Separatis sebagai motivasi kelompok separatis dan gerakan otonomi daerah dengan etnik sebagai kekuatan dasarnya. Aktivitas kelompok ini secara umum ialah tindakan-tindakan yang anti terhadap pemerintah maupun penyerangan terhadap keamanan area.
2. Religius sebagai motivasi kelompok ekstrim fundamental (sebagai contoh ialah ekstrimis Sikh di India, Macan Tamil di Srilanka, dan

⁷⁴ Petrus Reinhard Golose II, *op.cit.*, hlm 9.

lain-lain) yang melakukan serangan terhadap rakyat sipil baik berupa bom bunuh diri maupun kekerasan brutal.

3. Ideologi sebagai motivasi kelompok politik sayap kanan dan sayap kiri di suatu pemerintahan (sebagai contoh ialah gerakan fasis di Jerman dan Italia khususnya pada zaman Perang Dunia kedua) yang melakukan propaganda kebencian (*hate crime*), anti terhadap imigran maupun ras yang dianggap rendah.
4. Isu-isu utama (single issue) sebagai motivasi kelompok pemerhati lingkungan maupun makhluk hidup dengan aktivitas sabotase dan ancaman semata terhadap objek-objek vital.
5. Sponsor suatu negara sebagai motivasi kelompok yang tertekan oleh sebuah rezim pemerintahan dengan cara sabotase dan penyerangan menggunakan kekerasan.
6. Keterbelakangan mental bagi penderita sakit jiwa yang tidak memiliki akal yang sehat sehingga dapat melakukan kekerasan dengan alasan yang tidak jelas.

Kemudian terdapat beberapa karakteristik gerakan kelompok terorisme yang diketahui secara umum. Menurut Loudewijk F . Paulus, karakteristik terorisme dapat dibagi menjadi empat, yaitu :⁷⁵

⁷⁵ Loudewijk F. Paulus, *Terorisme*, URL : [http:// ditpolkom. bappenas. go. id/ basedir/ Politik_ Luar_ Negeri / Indonesia_ dan_ isu_ global /Terorisme/Terorisme.pdf](http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Politik_Luar_Negeri/Indonesia_dan_isu_global/Terorisme/Terorisme.pdf), diakses tanggal 4 November 2019, pukul 01:50 WIB

1. Karakteristik organisasi yang meliputi struktur organisasi, rekrutmen anggota, pendanaan organisasi, dan hubungan internasional maupun nasional.
2. Karakteristik operasi yang meliputi perencanaan, waktu, taktik, kolusi, dan strategi.
3. Karakteristik perilaku yang meliputi motivasi, dedikasi, disiplin, keinginan membunuh, dan keinginan menyerah hidup-hidup demi ideologi.
4. Karakteristik sumber daya yang meliputi latihan atau kemampuan individu maupun kelompok, pengalaman perorangan di bidang teknologi, persenjataan, perlengkapan, transportasi, serta pendukung operasi.

Secara garis besar terorisme memiliki kriteria dimana tindakan tersebut terencana dan terukur, dengan menggunakan kekerasan secara tidak sah terhadap kalangan *non-combatant* yang dapat menimbulkan keresahan, ketakutan, serta ketidakamanan, tanpa mengindahkan norma atau hukum perang yang ada. Teknik publikasi juga termasuk dalam kriteria apakah suatu tindakan dapat disebut sebagai terorisme atau tidak, yang akan dibahas lebih lanjut dalam sub bab mengenai propaganda.

Selain klasifikasi, kita juga perlu mengetahui tipologi terorisme. Tipologi ini berfungsi untuk mengetahui penyebab, strategi dan tujuan yang hendak dicapai dalam aksi teroris tersebut.

Menurut Paul Wilkinson ada beberapa macam tipologi terorisme, antara lain :

1. Terorisme epifenomenal (teror dari bawah) dengan cir-ciri tak terencana rapi, terjadi dalam konteks perjuangan yang sengit;
2. Terorisme revolusioner (teror dari bawah) yang bertujuan revolusi atau perubahan radikal atas sistem yang ada dengan ciri-ciri selalu merupakan fenomena kelompok, struktur kepemimpinan, program ideologi, konspirasi, elemen para militer;
3. Terorisme subrevolusioner (teror dari bawah) yang bermotifkan politis, menekan pemerintah untuk mengubah kebijakan atau hukum, perang politis dengan kelompok rival, menyingkirkan pejabat tertentu yang mempunyai ciri-ciri dilakukan oleh kelompok kecil, bisa juga individu, sulit diprediksi, kadang sulit dibedakan apakah psikopatologis atau kriminal;
4. Terorisme represif (teror dari atas atau terorisme negara) yang bermotifkan menindas individu atau kelompok (oposisi) yang tidak dikehendaki oleh penindas (rezim otoriter atau totaliter) dengan cara likuidasi dengan ciri-ciri berkembang menjadi teror masa, ada aparat teror, polisi rahasia, teknik penganiayaan, penyebaran rasa kecurigaan di kalangan rakyat, wahana untuk paranoid pemimpin.⁷⁶

⁷⁶ Dikutip dari Hery Firmansyah, Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia, yang ditulis dalam jurnal MIMBAR HUKUM, Vol. 23, No. 2, Juni 2011, hlm. 380

Selanjutnya dikutip dari *National Advisory Committee* dalam *the Report of the Task Force on Disorder and Terrorism* menggolongkan tipologi terorisme menjadi lima macam. Tipologi tersebut antara lain :

1. Terorisme politik, yaitu tindakan kriminal yang dilakukan dengan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam masyarakat dengan tujuan politik.
2. Terorisme non-politik, yaitu terorisme yang dilakukan untuk kepentingan pribadi termasuk aktivitas kejahatan terorganisasi.
3. Quasi terorisme adalah gambaran aktivitas yang bersifat isidental untuk melakukan kekerasan yang menyerupai terorisme, tapi tidak mengandung unsur esensialnya.
4. Terorisme politik terbatas menunjuk pada perbuatan terorisme yang dilakukan untuk tujuan politis tetapi tidak untuk menguasai pengendalian negara.
5. Terorisme pejabat atau negara (*official or state terrorism*) adalah terorisme yang terjadi di suatu bangsa yang tatanannya didasarkan atas penindasan.

Berdasarkan macam-macam tipologi terorisme tersebut dapat membantu menganalisa cara-cara yang umum digunakan dalam tindakan terorisme, diantaranya adalah pengeboman/teror bom, pembajakan, serangan militer dan pembunuhan, perampokan, penculikan dan penyanderaan, dan dengan cara serangan bersenjata.

Motif dari tindak pidana terorisme tersebut bersifat kompleks, karena tidak hanya dari faktor psikologis, namun juga faktor politik, agama, sosiologis, sosial budaya dan faktor lain yang bersumber daripada tujuan yang ingin dicapai.

Ada beberapa bentuk terorisme yang dikenal, yang perlu kita bahas dari bentuk itu antara lain teror kriminal dan teror politik. Kalau mengenai teror kriminal biasanya hanya untuk kepentingan pribadi atau memperkaya diri sendiri. Teroris kriminal bisa menggunakan cara pemerasan dan intimidasi.

Mereka menggunakan kata-kata yang dapat menimbulkan ketakutan atau teror psikis. Lain halnya dengan teror politik bahwasanya teror politik tidak memilih-milih korban. Teroris politik selalu siap melakukan pembunuhan terhadap orang-orang sipil: laki-laki, perempuan, dewasa atau anak-anak dengan tanpa mempertimbangkan penilaian politik atau moral, teror politik adalah suatu fenomena sosial yang penting. Sedangkan terorisme politik memiliki karakteristik sebagai berikut :

1. Merupakan intimidasi kohersif.
2. Memakai pembunuhan dan destruktif secara sistematis sebagai sarana untuk tujuan tertentu.
3. Korban bukan tujuan, melainkan sarana untuk menciptakan perang urat syaraf.
4. Target aksi teror dipilih, bekerja secara rahasia, namun tujuannya adalah publisitas.

5. Pesan aksi itu cukup jelas, meski pelaku tidak selalu menyatakan diri secara personal.
6. Para pelaku kebanyakan dimotivasi oleh idealisme yang cukup keras, misalnya “berjuang demi agama dan kemanusiaan”, maka hard-core kelompok teror adalah fanatik yang siap mati.⁷⁷

Kejahatan terorisme jika dibandingkan dengan jenis-jenis kejahatan lain, maka terorisme merupakan suatu kejahatan yang unik. Terdapat banyak elemen yang membedakannya dengan kejahatan yang lain, diantaranya seringkali terdapat elemen yang ekstrim (*extreme fear*), adanya tujuan tertentu, penggunaan teknologi baik di bidang persenjataan maupun teknologi lain misalnya komunikasi, dan gerakannya klandestin atau tertutup.

Mengenai tipologi terorisme, terdapat sejumlah versi penjelasan, di antaranya tipologi yang dirumuskan oleh “National Advisory Committee” (komisi kejahatan nasional Amerika) dalam *The Report of the Task Force of the on Disorders and Terrorism*, yang mengemukakan sebagai berikut, ada beberapa bentuk terorisme yaitu :

1. Terdiri atas pembunuhan politik terhadap pejabat pemerintah itu terjadi sebelum perang dunia II.
2. Terorisme dimulai di Al-jazair ditahun 50an, dilakukan oleh FLN yang mempopulerkan “serangan yang bersifat acak” terhadap masyarakat sipil yang tidak berdosa;

⁷⁷ Juliet Lodge, 1988:49

3. Terorisme muncul pada tahun 60an dan terkenal dengan istilah “terorisme media”, berupa serangan acak atau random terhadap siapa saja dengan tujuan publisitas.

Mengenai bentuk terorisme, terdapat sejumlah versi penjelasan, di antaranya bentuk yang dirumuskan oleh “*National Advisory Committee*” (komisi kejahatan nasional Amerika) dalam *The Report of the Task Force of the on Disorders and Terrorism*, yang mengemukakan sebagai berikut, ada beberapa bentuk terorisme yaitu :

1. Terorisme Politik yaitu perilaku kekerasan kriminal yang dirancang guna menumbuhkan rasa ketakutan di kalangan masyarakat demi kepentingan politik;
2. Terorisme nonpolitis yakni mencoba menumbuhkan rasa ketakutan dengan cara kekerasan, demi kepentingan pribadi, misalnya kejahatan terorganisasi;
3. Quasi terorisme, digambarkan dengan “dilakukan secara incidental”, namun tidak memiliki muatan ideology tertentu, lebih untuk tujuan pembayaran contohnya dalam kasus pembajakan pesawat udara atau penyanderaan dimana para pelaku lebih tertarik kepada uang tebusan daripada motivasi politik.
4. Terorisme politik terbatas, diartikan sebagai teroris, yang memiliki motif politik dan ideology, namun lebih ditujukan dalam mengendalikan keadaan (Negara). Contohnya adalah perbuatan teroris yang bersifat pembunuhan balas dendam.

5. Terorisme Negara atau pemerintahan yakni suatu Negara atau pemerintahan, yang mendasarkan kekuasaannya dengan ketakutan dan penindasan dalam mengendalikan masyarakatnya.

Terorisme yang dilakukan oleh Negara merupakan salah satu bentuk kejahatan yang tergolong sangat istimewa. Sebab Negara adalah suatu organisasi besar yang dipilari oleh kekuatan rakyat, namun disisi lain punya kewajiban mengatur, melindungi, dan menyejahterakan kehidupan rakyat secara material maupun non material. Tatkala Negara itu, melalui pejabat pemerintahannya terlibat dalam tindakan criminal secara vertical, horizontal, regional, nasional maupun internasional, maka otomatis rakyatlah yang dikorbankan.